

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2020-2022

Phyta Rahima
phytarahim@gmail.com
Universitas Bumigora

Irwan Cahyadi
irwancahyadi@universitasbumigora.ac.id
Universitas Bumigora

Isra Dewi Kuntary Ibrahim
israibrahim@universitasbumigora.ac.id
Universitas Bumigora

Adrianda Anwar
adriandaanwar_feb@unram.ac.id
Universitas Mataram

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the open unemployment rate in Mataram city at 2020 - 2022. The research method used in this study is a type of quantitative method. The panel data used in this study were processed using Microsoft Excel and Stata 14. This study used panel data regression analysis with a random-effect model. The results of the study show that the labor force and education level have a significant effect on the open unemployment rate in districts/cities in the Province of NTB 2020 - 2022. On the other hand, the minimum wage and economic growth show insignificant results. Minimum wages, labor force, and economic growth have a negative effect on the unemployment rate in Mataram City in 2020 - 2022, while the level of education has a positive effect. Simultaneously the minimum wage, labor force, economic growth, and education level also have a significant effect on the open unemployment rate in Mataram City in 2020 - 2022

Keywords: *economic growth, level of education, minimum wage, open unemployment rate, workforce*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil baru saja merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022. Isinya, diketahui jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia muncul juga berbagai permasalahan diantaranya masalah pengangguran. Masalah pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. Salah satu indikator tingginya angka pengangguran dapat dilihat dari lamanya pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berkaitan dengan permasalahan pengangguran, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu (i) kapasitas atau kemampuan keterampilan pencari kerja yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pasar tenaga kerja, (ii) kesempatan kerja yang merupakan lapangan kerja yang diisi dengan kegiatan ekonomi. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat

dari penambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Sukirno, 2016).

Pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluarannya. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk bagi diri penganggur dan keluarganya (Sukirno, 2016). Menurut data yang diperoleh dari bps.go.id mengenai tingkat pengangguran terbuka per Februari 2022 yaitu; TPT menurun di seluruh provinsi di Indonesia, penurunan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,10%. TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,53%, TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,11 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan Februari 2021. Terdapat 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,96 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,55 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,58 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (9,44 juta orang). Sebagaimana dijelaskan pada gambar diagram di bawah ini:



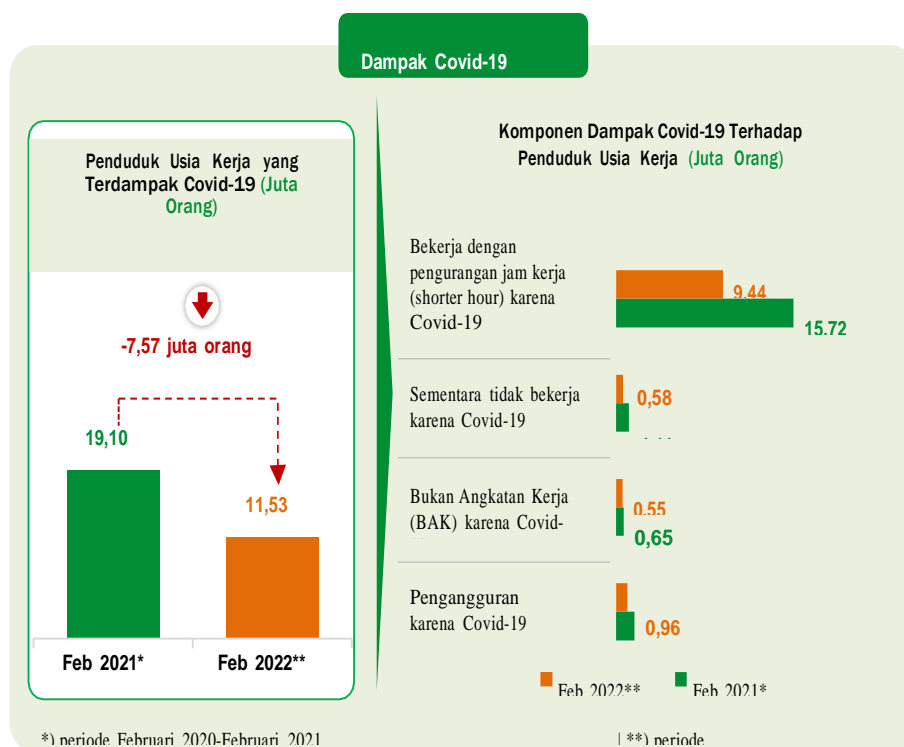
Gambar 1: Jumlah dan Tingkat Pengangguran di Indonesia Februari 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Pada gambar 1 di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6,93 juta orang menjadi 8,75 juta orang. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya pengaruh COVID-19 yang dirasakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia yang mengakibatkan kemampuan perusahaan untuk bertahan semakin melemah. Salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk tetap bisa bertahan adalah dengan melakukan pengurangan karyawan, baik secara tetap maupun yang bersifat sementara. Selain mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja, COVID-19 juga berdampak pada penurunan pendapatan/upah buruh hampir di seluruh bidang usaha (Lidwina, 2020). Pada tahun 2022, setelah kondisi COVID-19 agak mereda, dan pemerintah melonggarkan aturan terkait *physical distancing*, perusahaan mulai menambah karyawan mereka, hal ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja yang mulai meningkat sehingga mengurangi tingkat pengangguran menjadi 8,40 juta orang. Meskipun jumlah penurunan pengangguran masih tergolong kecil,

namun hal tersebut dapat menjadi awal dari kebangkitan perusahaan dari kondisi keterpurukan akibat COVID-19.

Kondisi perusahaan pasca COVID-19 tidak ujug-ujug dapat kembali normal sebagaimana kondisi mereka sebelum terjadinya pandemi. Masih banyak permasalahan yang mesti ditata kembali. Hal tersebut seakan-akan menempatkan posisi perusahaan kembali dari awal dalam merintis usaha. Tidak hanya perusahaan, hal tersebut juga dirasakan oleh pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersaing dengan kondisi yang baru, yaitu digitalisasi di berbagai aspek usaha. Hal ini merupakan tantangan bagi para tenaga kerja dengan usia produktif untuk dapat menguasai dan atau mengoptimalkan penggunaan teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robbi (2022) dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak tenaga kerja dengan usia produktif yang tidak siap untuk menghadapi persaingan kerja pasca COVID-19 yang disebabkan oleh dampak psikologis dari minim aktivitas pada saat pandemic. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang harus disoroti oleh pemerintah, karena tenaga kerja dengan usia produktif merupakan kelompok tenaga kerja dengan jumlah tertinggi yang terkena dampak COVID-19. Berikut disajikan data usia kerja yang terkena dampak COVID-19.



Gambar 2. Dampak Covid-19 terhadap Usia Kerja (2020-2022)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan gambar di atas, sejak 2019 terjadi banyak PHK yang menyebabkan Tingkat pengangguran terbuka juga semakin bertambah. Selain COVID-19 yang menjadi penyebab pengangguran, kekakuan upah dan efisiensi upah juga bisa menjadi penyebab pengangguran (Khotimah, 2018). Kekakuan upah (*wage rigidity*) gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Pada ekulibirium pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel. Kadang-kadang upah riil tertahan di atas tingkat kliring pasar (*market clearing level*) atau tingkat ekulibirium (Mankiw, 2003). Peningkatan upah tidak selamanya memberi dampak positif bagi tenaga kerja, apabila tingkat upah di suatu daerah tergolong tinggi dalam realita tidak semua perusahaan mampu melakukan pembayaran upah sesuai ketentuan. Hukum permintaan pasar tenaga kerja yaitu apabila upah pasar naik maka kuantitas tenaga kerja yang

diminta akan menurun, dan apabila upah pasar turun maka kuantitas tenaga kerja yang diminta akan meningkat (Cahyani, 2016).

Selanjutnya, Cahyani (2016) menjelaskan bahwa peningkatan upah dapat mengakibatkan perusahaan mensubstitusikan tenaga kerja dengan modal sehingga menyebabkan kuantitas tenaga kerja yang diminta menurun. Hal ini juga sejalan dengan hukum permintaan pasar tenaga kerja, yaitu apabila upah pasar naik maka kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun, dan apabila upah pasar turun maka kuantitas tenaga kerja yang diminta akan meningkat. Pramudjasi, et al. (2019) dan Wardiansyah, et al. (2016) menyatakan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Paser. Artinya jika upah naik satu satuan, maka akan menurunkan pengangguran. Sedangkan variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan, bagaimanapun tinggi atau rendahnya pendidikan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Paser.

Menurut Mankiw (2006), upah yang tinggi dapat mempertahankan tenaga kerja (karyawan) yang ingin keluar dari sektor usaha serta tidak akan menerima tenaga kerja yang baru dengan cepat tanpa keahlian dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan upah yang tinggi perusahaan dapat meningkatkan kualitas rata-rata karyawan, apabila upah diturunkan maka para pekerja dapat berhenti dari perusahaan dan beralih kepada sektor usaha yang memberi intensif yang tinggi. Hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dengan asumsi akan mendapatkan upah tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima, maka jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengangguran

Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (2008) dalam (Muslim, 2014), pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur

2.2. Tingkat Upah

Upah atau gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau berupa barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah atau gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2018). Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan, dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar persetujuan atau perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar

perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan (Wardiansyah et al., 2016). Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, dalam hal ini upah minimum merupakan upah pokok atau tunjangan. Hubungan upah dan pengangguran dapat dijelaskan dalam bentuk kurva Philips. Kurva Philips menggambarkan ciri hubungan di antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran atau di antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Berikut kurva yang menunjukkan hubungan antara kenaikan tingkat upah nominal dan tingkat pengangguran (Silalahi dalam Pramudjasi. et al., 2019)

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu (Soepono, 2001). Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan

2.4. Angkatan kerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Yang termasuk angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik (2018) antara lain :

- 1) Penduduk usia kerja, merupakan penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- 2) Penduduk yang termasuk angkatan kerja, merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 3) Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- 4) Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, merupakan keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
- 5) Penganggur terbuka, terdiri dari :
 - a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
 - b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
 - c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

2.5. Tingkat Pendidikan di NTB

Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi generasi penerus bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran 20 persen dari APBN, utamanya di daerah tertinggal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merumuskan sasaran pembangunan pendidikan dengan target capaian tahun 2020 dan pencapaiannya sebagai berikut.

Tabel 1. Sasaran Pembangunan Pendidikan Dengan Target Capaian Tahun 2020

Indikator	Target Tahun 2020 RPJMD	Capaian Tahun 2020	Perbandingan target dan capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
APK PAUD*	79,47	42,11	(-)
APM SD/MI	99,74	98,87	(-)
APK SD/MI/SDLB/Paket A	107,00	107,02	(+)
APM SMP/MTs	98,64	83,92	(-)
APK SMP/MTs/Paket B	110,00	93,59	(-)
APM SMA/MA/SMK	92,42	66,04	(-)
APK SMA/MA/SMK/Paket C	98,63	91,77	(-)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Semakin tinggi nilai indikator dapat diartikan bahwa pemerintah berhasil dalam menyukseskan program pendidikan yang merata. Pada tabel di atas terlihat bahwa target RPJMD yang sudah tercapai hanya satu indikator yaitu AP

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kausalitas dengan menggunakan data-data sekunder dalam rentang waktu tahun 2020-2022 yang meliputi data pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat, data PDRB Provinsi NTB, data upah Provinsi NTB, Angkatan Kerja Provinsi NTB, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik angket dan studi kepustakaan yang diperoleh dari data data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistic terutama NTB dalam angka. Adapaun variable penelitian yang digunakan antara lain :

1) Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2017). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengangguran terbuka. Pengangguran dalam penelitian ini adalah angkatan kerja umur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Skala yang digunakan adalah rasio.

2) Variabel Bebas

Variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2017). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendidikan (X_1) dan upah (X_2). Variabel pendidikan (X_1) dalam penelitian ini adalah adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden. Variabel upah (X_2) dalam penelitian ini adalah upah yang ditetapkan oleh Provinsi NTB. Satuan yang digunakan adalah Rupiah.

4. Analisis Data dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda berupa data panel (*pooled data*), yaitu merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Data *time series* meliputi satu objek, sedangkan data *cross section* terdiri atas beberapa atau banyak objek (Sarwono, 2006). Model dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + e$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemilihan model estimasi dengan melakukan pengujian uji Chow dan uji Hausman.
- 2) Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi panel, yang harus memenuhi kriteria uji f-statistik (uji simultan) dan uji t (uji parsial).

4.1. Model Regresi

Penelitian ini menggunakan jenis data panel dengan menggunakan tiga model regresi yaitu *common effect model* Hausman Test H_0 = menggunakan *random effect model*. Jika nilai $pvalue > \alpha$ maka H_0 diterima. Model yang digunakan adalah *random effect model*. H_1 = menggunakan *fixed effect model*. Jika nilai $pvalue < \alpha$ (H_0 diterima). Adapun hasil pengolahan data atas model regresi ditampilkan pada table berikut :

Tabel 2. Tabel Model Regresi

Model Estimasi	Alat Pengujian	Chi-Square	P-Value	Model yang Digunakan
<i>Common effect model</i> atau <i>fixed effect model</i>	Uji Chow	42.628242	0.0000	<i>Fixed effect model</i>
<i>Fixed effect model</i> atau <i>random effect model</i>	Uji Hausman	0.003662	0.7788	<i>Random effect model</i>
<i>Common effect model</i> atau <i>random effect model</i>	Uji Lagrange Multiplier	17.47245	0.0000	<i>Random effect model</i>

Sumber : Olah data statistik (2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas didapat nilai $p-value$ sebesar $0.0000 < 0.05$ hal ini dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak, maka H_1 diterima yang artinya model *fixed effect* lebih baik dari model *common effect*. Pengujian Hausman menunjukkan nilai $p-value$ sebesar $0.7788 > 0.05$ sehingga H_0 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *fixed effect*. Selanjutnya pengujian Lagrange Multiplier menunjukkan nilai $p-value$ sebesar $0.0000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *common effect*. Dari hasil pengujian diatas maka model yang dipilih adalah *random effect model*

4.2. Uji Signifikansi

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji t (uji parsial) dan uji f (uji simultan). Berikut hasil dari estimasi *random effect model*:

Tabel 3. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel	Koefisien	P-Value	Keterangan
C	24.96799	0.0012	Signifikan
X_1	1.023938	0.0000	Signifikan
X_2	-0.050342	0.0000	Signifikan
Prob > f (statistik)		0.000000	Signifikan
R-squared		0.267843	
Jumlah Observasi		150	

Sumber: Olah data statistik (2022)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dijelaskan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *random effect model* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Uji Signifikansi Parsial

Variabel pendidikan memiliki *probability* $0.0000 < 0.05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan dengan pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki *probability* $0.0000 < 0.05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Upah Minimum Provinsi dengan pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB.

2) Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.4 menunjukkan nilai *f*- statistik sebesar 0.00 di mana nilai tersebut memiliki nilai *probability* lebih kecil 0.05 sehingga variabel pendidikan dan Upah Minimum Provinsi diasumsikan secara simultan berpengaruh terhadap pengangguran terbuka dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil pengujian di atas nilai *R-square* sebesar 0.36. Artinya model ini mampu menjelaskan hubungan antara pendidikan dan Upah Minimum Provinsi sebesar 36 persen,

3) Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah menentukan model estimasi terbaik sehingga terpilih model *random effect* maka selanjutnya analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu model hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Regresi linear berganda digunakan untuk melihat arah hubungan, baik hubungan positif atau negatif dari masing-masing variabel. Selain itu model ini dapat memprediksi nilai dari variabel terikat jika variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan pengangguran terbuka sebagai variabel bebas sedangkan variabel bebas menggunakan variabel pendidikan dan upah minimum provinsi. Berikut persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = 33.96 + 2.02Ln(Pen_{it}) - 0.03Ln(UMP_{it}) + e$$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut

- Nilai konstanta adalah sebesar 33.96 artinya jika variabel bebas yaitu pendidikan dan UMP dianggap konstan maka nilai pengangguran terbuka yang dilambangkan dengan *Y* adalah sebesar 33.96 %.
- Nilai koefisien pendidikan sebesar 2.02 hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka, jika variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen variabel pendidikan, jumlah pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 2.02 persen.
- Nilai koefisien UMP sebesar -0.03 hal ini menunjukkan bahwa variabel UMP berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka, jika variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen variabel UMP, jumlah pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar 0.03 persen.

4.3. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Berikut hasil penelitian terkait pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB.

Tabel 4 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X ₁	2.023938	0.247236	8.186273	0.0000

Sumber : Olah data statistik (2022)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dijelaskan hasil *coefficient* variabel pendidikan adalah sebesar 2.023 dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < 0.05$ yang berarti bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Hasil koefisien menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai *coefficient* variabel pendidikan 2.023 artinya setiap kenaikan sebesar 1% pendidikan maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2.023 persen. Sebaliknya apabila tingkat pendidikan turun sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 2.023 persen.

Hasil penelitian Pratomo (2017) tentang Fenomena Pengangguran Terdidik di Indonesia menyatakan bahwa salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut dengan pengangguran terdidik. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional 2016 pengangguran di Indonesia didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah menengah atas (baik umum maupun kejuruan) dan pendidikan tinggi (sarjana atau diploma). Hal ini tidak sesuai dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam meningkatkan penghasilan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan (Sumarsono, 2009).

Salah satu penyebab meningkatnya pengangguran pada lulusan pendidikan tinggi adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, pencari kerja lulusan pendidikan tinggi lebih memilih-milih pekerjaan sesuai dengan jurusan yang dimiliki. Pengangguran dengan tingkat pendidikan sarjana di Indonesia tergolong sangat banyak. Bila ditotalkan setidaknya ada sekitar 708.254 pengangguran dari kalangan sarjana muda (Badan Pusat Statistik, 2018). Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu: (i) minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau jurusan yang dimiliki oleh lulusan sarjana. Banyak sarjana yang harus berprofesi menjadi tenaga bidang lain yang berbeda dengan jurusan, (ii) menurunnya kualitas sarjana, (iii) enggan sarjana untuk pulang kampung membangun tanah kelahirannya.

4.4. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Berikut tabel pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 5. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X ₂	-0.030342	0.006918	-4.385777	0.0000

Sumber : Olah data statistik (2022)

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dijelaskan nilai koefisien upah minimum provinsi sebesar -0.030 dan signifikan $0.00 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila upah minimum meningkat maka akan menurunkan pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardiansyah et al., (2016), di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Artinya setiap kenaikan pendidikan yang ditamatkan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Hal ini dikarenakan lulusan pendidikan rendah tidak memilih-milih pekerjaan dan bersedia bekerja di sektor informal.
- 2) Variabel upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa apabila upah naik satu satuan maka akan menurunkan tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan Kurva Philip yang menyatakan bahwa jika upah meningkat di suatu daerah akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2018). Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia Februari 2018. *BPS News*.
- Cahyani, N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upahminimum Regional, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran Di Diy Tahun 1986-2015. *Skripsi*.
- Khotimah, H. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Diy Tahun 2009-2015. *Skripsi*.
- Lidwina, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Penghasilan Masyarakat. *Databoks.Katadata.Co.Id, April, 2020*.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka Dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, 15(2)*, 171–181.
- Pramudjasi., R., Juliansyah, & Lestari, D. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta Upah terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser. *Kinerja, 16(1)*, 69–77. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/5284/472>
- Pratomo, D. S. (2017). Fenomena pengangguran terdidik di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage, 7(September)*, 642–648.
- Robbi, I. (2022). Peluang Serapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur Setelah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ketenagakerjaan, 17(1)*. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.108>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Soepono, P. (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. *Journal of Indonesian Economy and Business, 16(1)*, 41.
- Sugiono. (2017). Pengertian Skala Likert dan Contoh Cara Hitung Kuesionernya. In *Diedit.Com*.
- Wardiansyah, M., Yulmardi, & Bahri, Z. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ttingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-provinsi se-Sumatera). *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan, 5(1)*, 13–18. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf